

**KONSEP MENGHIDUPKAN TANAH MATI MENURUT
IMAM ABU HANIFAH BESERTA RELEVANSINYA
DENGAN UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA
(UU NO.5 TAHUN 1960)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

Oleh :

IFROH FITRIA

23.13.4.041



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017 M/1438 H**

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **KONSEP MENGHIDUPKAN TANAH MATI MENURUT IMAM ABU HANIFAH BESERTA RELEVANSINYA DENGAN UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA (UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1960).**

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat, petunjuk dan nikmat kepada manusia yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dan kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 (S 1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Selama mengerjakan skripsi ini hingga terselesainya, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan, baik dari segi moril maupun

materil. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Hasimuddin Lbs dan Ibunda Saumian Nst yang tercinta dan tersayang yang telah mendidik, memotivasi dan mengarahkan penulis tanpa mengenal lelah dalam memberikan dukungan moril maupun materil serta tanpa pernah bosan dalam memberikan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menganyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
3. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M. Hum selaku Dekan Fakultas Sya'riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
4. Ibunda Fatimah, S. Ag. MA selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung S.H.I, MA selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)
5. Pembimbing I kepada Bapak Drs.H.Syu'aibun, M. Hum, yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dan juga tidak pernah lelah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibunda Syofiaty Lubis, SH.MH selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dan juga tidak pernah lelah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr.Syukri Albani Nasution, MA dan Ibunda Fauziah Lubis, M.Hum Selaku Staf Akademik dan Ibunda Syofiaty Lubis SH. MH Selaku Penasehat Akademik Penulis yang telah memberikan pandangan pikiran optimis dan semangat dalam menulis skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Abangda Al-Azhar, Kakanda Efri Eliyanti dan Zuriyatul Asmi, dan Adinda Aulia Rifky yang senantiasa memberikan dukungan semangat guna dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Lelaki terdekat dan Guru Segala Bidangku, Zulhamdi Nst, tetaplah menjadi orang terdekatku detik lalu, kini, dan detik yang akan datang.
9. Teman-teman satu Jurusan Siyasa B dan A stambuk 2013 khususnya kepada sahabat saya Elistiya Ningsih dan Putri Sumarni dan sahabat lainnya Rahayu Manda Sari, Asnila Kurniati Siregar, Siti Laelatul Badriyah, Ratu Juliana Harahap, Aida Syahfitri Ramli,

dan Muhammad Choiri sahabat-sahabat saya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu untuk membantu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga partisipasi dari berbagai pihak tersebut menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT dan memberikan balasan sebagaimana mestinya di dunia dan akhirat. *Amin...*

Akhiranya, demikianlah yang dapat penulis sampaikan mudah-mudahan skripsi ini dapat membawa manfaat yang besar, khususnya untuk penulis dan peningkatan wacana berpikir dalam ilmu Siyasah.

Medan, 26 Juli 2017

Wassalam

Penulis

IFROH FITRIA

NIM.23134041

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **KONSEP MENGHIDUPKAN TANAH MATI MENURUT IMAM ABU HANIFAH BESERTA RELEVANSINYA DENGAN PASAL POKOK AGRARIA (UNDANG UNDANG NO.5 TAHUN 1960)**. Masalah yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah. Pertama; Bagaimana konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah. Kedua; Bagaimana Ihyaul mawat dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ketiga; Bagaimana analisa peneliti terhadap Ihyaul mawat berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.

Dari perumusan masalah diatas menjadi acuan dalam penelitian ini. Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian berupa penelitian pustaka (library research), yaitu dengan meneliti mempergunakan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan, baik buku primer maupun sekunder, yang gunanya adalah untuk merumuskan data-data yang lebih akurat dalam mengambil suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian ini.

Konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah yang dibahas pada skripsi ini adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang seluruh wilayah Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang berarti bahwa hak bangsa Indonesia atas tanah meliputi seluruh tanah yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa tanah-tanah yang ada di Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwasannya menghidupkan tanah mati itu adalah harus ada izin dari pemerintah. Apabila pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh langsung menggarap lahan itu. Dan lahan itu harus sudah digarap dalam jangka waktu tiga tahun, jika selama tiga tahun itu tidak digarap secara intensif maka pihak pemerintah berhak mengambil lahan itu serta memberikannya kepada orang lain.

Adapun hasil analisa dalam penelitian dalam penelitian ini, bahwasannya di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa bumi (tanah), air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, bukan merupakan milik negara akan tetapi pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh negara, agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan salah

satu ayat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, ternyata bahkan sebaliknya hanya banyak hal justru merupakan penghambat dari pada tercapainya cita-cita tersebut.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Kajian Pustaka.....	17
E. Metodologi Penelitian.....	18
F. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : IHYAUL MAWAT DALAM MAZHAB HANAFI	21
A. Sejarah Singkat Mazhab Hanafi	21
B. Pengertian Ihyaul Mawat.....	27

C. Syarat-syarat Ihyaul Mawat	31
D. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Cara Ihyaul Mawat.....	39

BAB III : IHYAUL MAWAT DALAM UNDANG UNDANG POKOK

AGRARIA.....

A. Pengertian Agraria dan Kaitannya dengan Ihyaul Mawat	45
B. Hak Penguasa Atas Tanah	53

BAB IV : ANALISIS 60

A. Analisis Penulis Tentang Ihyaul Mawat Dalam Fiqh Hanafi	60
B. Analisis Penulis Tentang Undang Undang Pokok Agraria Dalam Ihyaul Mawat	63

BAB V : PENUTUP..... 67

A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68

DAFTAR PUSTAKA 69

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi kata *Ihya* artinya menjadikan sesuatu menjadi hidup, dan *al-mawat* ialah sesuatu yang tidak bernyawa, dalam konteks ini ialah tanah yang tidak dimiliki seseorang dan belum digarap. Pembahasan tentang *Ihya'ul mawat* berkaitan dengan persoalan tanah kosong yang belum digarap dan belum dimiliki seseorang.¹

Kalimat atau kata *Ihya'ul mawat* terdiri dari dua kata yakni *Ihya'* yang berarti menghidupkan dan *al-mawat* yang berarti sesuatu yang mati. Yang dimaksudkan dengan kata *al-mawat* itu adalah bumi atau tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada memanfaatkannya.² Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

¹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama Tahun 2000) h. 45.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002 h. 267.

Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.” Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang lebar. Adapun ruang dalam yuridis, yang terbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, yang dipelajari dalam Hukum Penataan Ruang.³ Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak atas yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.

Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, dan perkebunan.

³ Urip Santoso, *Hukum agrarian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 9-10.

Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruangan yang diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Efendi Perangin menyatakan bahwa Hukum Tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas Tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret.⁴

Objek Hukum Tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi criteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diluar dalam Hukum Tanah.

⁴Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1989, h. 195.

Sehubungan dengan itu terdapat beberapa rumusan tentang *Ihyaul mawat* di antaranya: Imam Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini dalam kitabnya mengatakan: tanah mati adalah tanah yang belum dimakmurkan sama sekali.⁵

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Gazzi, bahwa yang dimaksud bumi mati sebagai mana pendapat imam Rafi'i tersebut dalam *Sarh Syaghir* yaitu bumi yang tidak ada pemiliknya dan belum ada seorang pun yang mengambil manfaat bumi tersebut.⁶ Tidak semua tanah kosong boleh dijadikan *Ihyaul mawat*. Untuk itu, ulama membaginya dua bagian tanah yaitu tanah yang kosong bisa menjadi obyek *Ihyaul mawat* dan yang tidak bisa menjadi obyek *Ihyaul mawat*. Mereka sepakat menyatakan bahwa lahan yang belum dimiliki seseorang, misalnya tidak ada tanda-tanda lahan itu digarap dan tidak ada bangunan di atasnya, boleh digarap siapapun. Ulama juga sepakat menyatakan bahwa sebidang tanah yang telah menjadi milik seseorang, sekalipun belum dimanfaatkan, tidak bisa dijadikan obyek *Ihyaul mawat*. Mazhab Maliki menyatakan tanah yang telah berubah menjadi

⁵Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayat Al Akhyar Fii Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), h, 315

⁶Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, h. 305

tanah kosong karena ditinggalkan penggarapannya sehingga tidak terurus boleh digarap oleh orang lain.

Alasannya berdasarkan keumuman hadis yang menyatakan “siapa yang mengolah sebidang tanah atau lahan kosong maka lahan tersebut menjadi miliknya.”⁷

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

و عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم. من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق (روه احمد و ابو داود و الترمذي)

“Dari Said bin Zaid ra dari Nabi SAW beliaubersabda: barang siapa menghidupkn tanah mati, ia menjadimiliknya. Riwayat tiga Imam, dan hadits Hasan menurut Tirmidzi. Dan ia berkata: sebagian riwayat hadits tersebutmurshal, dan memang demikian. Sahabat yang meriwayatkan masih berbeda pendapat. Ada yang menyatakan Jabir, ada yang mengatakan Aisyah dan ada yang mengatakan Abdullah bin Umar, dan yang terkuat adalah yang pertama.”

Adapun tentang persyaratan harus ada izin dari pemerintah, maka Sayyid Sabiq dalam kitabnya mengucapkan:

Para fuqaha sepakat bahwa penyuburan tanah tandus menjadi sebab pemikiran. Hanya mereka berbeda pendapat tentang: apakah perlu dengan izin pemerintah atau tidak. Sebagian ulama berpendapat: bahwa penyuburan

⁷Sekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazali, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 305

tanah tandus menjadi sebab pemilikan tanah, tanpa adanya persyaratan izin dari pemerintah. Manakala orang menyuburkannya, maka tanah itu otomatis menjadi miliknya tanpa meminta izin lagi dari pemerintah, dan menjadi kewajiban pemerintah memberikan haknya jika ia mengadukan persoalan pada waktu terjadi perselisihan. Berdalil kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Said bin Zaid, bahwa Nabi SAW, bersabda: “Siapa yang menyuburkan tanah tandus, maka tanah itu menjadi miliknya”. Abu Hanifah berpendapat: penyuburan tanah tandus memang menjadi sebab pemilikan (tanah), hanya di syaratkan mendapatkan izin dari pemerintah (imam) dari pengakuannya. Sedang Imam Malik membedakan antara tanah yang dekat dengan perkampungan dengan tanah yang jauh dari padanya. Jika tanah itu berdekatan, maka harus dengan izin pemerintah. Sedangkan jika jauh, maka tidak di syaratkan adanya izin, dia otomatis menjadi milik orang yang menyuburkannya.⁸

Ihya'ul mawat bertujuan agar bertujuan agar lahan-lahan yang gersang menjadi tertanami, yang tidak produktif menjadi produktif , baik sebagai lahan pertanian, perkebunan, maupun untuk bangunan. Sebidang tanah atau lahan dikatakan produktif, apabila menghasilkan atau member manfaat kepada masyarakat. Indikasi yang menunjukkan kepada adanya *Ihya'ul mawat*

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Juz 3, (Kairo: Makkah Dar al-Turas), h.201-202

adalah dengan menggarap tanah tersebut, misalnya jika tanah itu ditujukan untuk keperluan pertanian atau perkebunan tanah tersebut dicangkul, dibuatkan irigasi dan lain sebagainya. Dan jika tanah tersebut diperlukan untuk bangunan di tanah tersebut didirikan bangunan dengan sarana-prasarana umum sebagai penunjangnya.

Menurut Imam Syafi'i yang disebut lahan yang mati adalah setiap lahan yang tidak digarap meskipun lahan tersebut menyatu dengan lahan yang digarap. Abu Hanifah berkata berkata, "Lahan yang mati adalah lahan yang jauh dari lahan yang digarap dan air tidak sampai kepadanya." Abu Yusuf berkata, "Lahan yang mati adalah setiap lahan tanah, jika seseorang berdiri ditempat yang paling dekat dengan tanah yang digarap kemudian ia berteriak dengan suara yang paling nyaring, suaranya tidak terdengar oleh orang terdekat dengannya di tanah yang digarap tersebut." kedua pendapat ini sama-sama menegaskan bahwa lahan tanah yang mati tersebut menyatu dengan tanah yang digarap. Dalam hal ini, orang yang bersebelahan dengan lahan mati memiliki hak yang sama dengan orang yang berjauhan dengannya di dalam kebolehan menghidupkannya. Imam Malik berkata, "Orang yang bersebelahan dengan lahan mati lebih berhak menghidupkannya dari pada orang yang berjauhan dengannya."

Mengenai cara menghidupkan lahan yang mati tersebut disesuaikan dengan tradisi yang berlaku sebab Rasulullah s.a.w. memberikan ketentuan yang bersifat umum tentang cara menghidupkan lahan yang mati. Itu berarti, cara menghidupkannya disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Misalnya, jika ada orang ingin menghidupkannya adalah dengan membuat bangunan di atasnya dengan memberi atap. Pasalnya, seperti itulah kesimpurnaan awal sebuah bangunan untuk bisa ditempati.

Jika ada orang ingin menghidupkan lahan yang mati untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, ada tiga syarat yang harus terpenuhi.

1. Mengumpulkan tanah disekeliling lahan yang mati hingga tanah tersebut menjadi batas pemisah antara lahan yang mati dan lahan lainnya.
 2. Mengalirkan air ke lahan yang mati tersebut jika jenis tanahnya kering dan mencegah masuknya air kedalamnya jika ia berupa saluran air.
- Cara menghidupkan lahan yang kering adalah dengan mengalirkan air kedalamnya dan cara menghidupkan lahan yang berupa saluran air adalah dengan mencegah masuknya air kedalamnya hingga lahan tersebut dapat dijadikan lahan pertanian dan perkebunan didalam dua kondisinya.

3. Membajaknya. Membajak artinya mengolah tanah dengan cara membalikkan tanah yang bagian bawah ke atas dan bagian atas ke bawah.

Jika ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, terwujudlah upaya menghidupkan lahan yang mati menjadi sah kepemilikan orang yang menghidupkannya atas lahan tersebut. Ada diantara penganut mazhab safi'i yang berpendapat seperti ini, "Orang tersebut belum berhak memiliki lahan yang mati tersebut hingga ia menanaminya terlebih dahulu." Tentu saja, pendapat seperti ini tidak benar karena status lahan yang sama dengan tempat tinggal sehingga syarat kepemilikannya tidak harus dengan cara mendalaminya.

Jika ada orang yang menanami lahan mati tersebut, setelah sebelumnya dihidupkan, yang menjadi pemilik sah lahan tersebut adalah orang yang menghidupkannya, sedangkan sipenanam hanya menjadi pemilik atas tanamannya. Jika si pemilik lahan yang mati tersebut ingin menjualnya, hal itu diperbolehkan.⁹

Imam Syafi'i dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada syarat izin imam bagi *Ihya'ul mawat*. Barang siapa mensyaratkan adanya izin imam

⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, *Sistem pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 313-314.

dalam barang siapa mensyaratkan adanya izin imam dalam *Ihya'ul mawat*, maka baginya menentang hadis sahih. Masalahnya, apa yang menjadi ukuran bagi Imam Syafi'i mengatakan demikian, dan ini berarti berhubungan dengan soal penggunaan metode istinbath.

Hukum membuka tanah baru adalah *jaiz* (boleh) bagi orang islam, dan sesudah dibuka tanah itu menjadi miliknya.

Sabda Rasulullah Saw :

عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. رواه اترمذى وصححه

Dari Jabir. Nabi Saw. Bersabda, barang siapa membuka tanah yang baru, maka tanah itu menjadi miliknya.” (Riwayat Tirmizi dan dinilainya sebagai Hadis Shahih)

من احيا ارضا ميتة فله فيها اجر وما اكلت العوافي منها فهو له صدقة. رواه النسائي

“Barang siapa yang membuka tanah yang belum dimiliki orang, maka ia mendapat ganjaran, dan tanamannya yang dimakan oleh binatang menjadi sedekah.” (Riwayat Nasai)

Dengan hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa membuka tanah baru hukumnya *sunat*, bukan *jaiz*.

Adapun tanah yang dibuka itu tanah kepunyaan orang lain, maka hukumnya haram, kecuali dengan izin pemiliknya.

Sabda Rasulullah Saw:

من اخذ سيرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامة من سبع ارضين رواه البخاري ومسلم

“Barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan jalan zalim (aniaya) maka sesungguhnya tanah ketujuh lapisnya nanti pada hari kiamat akan dibebankan kepundaknya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dengan adanya hadis-hadis tersebut di atas, para ulama berpendapat bahwa hukum *Ihya'ul mawat* adalah mubah, bahkan ada yang mengatakan sunah. Yang jelas hadis-hadis tersebut memotivasi ummat islam untuk menjadikan lahan yang kosong menjadi lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan oleh Allah swt, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.

1. Izin penguasa dalam *Ihya'ul mawat*

Para ulama berbeda pendapat tentang perlunya izin penguasa atau pemerintah untuk membuka lahan yang baru dan memfungsikan lahan yang gersang. Pendapat mereka terbagi dua golongan besar yakni ulama Hanafiyah dan Malikiyah.

Hanafiyah berpendapat bahwa bagi seseorang yang akan membuka atau menghidupkan lahan yang kurang berfungsi, diwajibkan meminta izin kepada penguasa atau pemerintah. Lebih jelas lagi dalam kitab *Mughni Muhtaj*, as-Syarbaini Khatib menjelaskna secara detail sebagai berikut. Menurut Hanafiyah pengolahannya harus mendapat izin dari penguasa atau pemerintah. Apabila penguasa atau pemerintah tidak mengizinkannya maka seseorang tidak boleh langsung mengolah lahan itu. Selain itu menurut

Ulama Hanafiyah, lahan tersebut harus di olah dalam waktu tiga tahun. Jika tidak sanggup mengolahnya penguasa atau pemerintah berhak mengambil lahan itu serta memberikannya kepada orang lain.

Pembatasan waktu tiga tahun ini berdasarkan pendapat Umar bin Khatab yang menyatakan “orang yang hanya sekedar memagar lahan sampai dengan tiga tahun dan tidak mengolahnya, maka dia tidak berhak lagi atas lahan itu”. Sementara Syafi’iyah dan Hambaliyah tidak menggunakan pendapat Umar tersebut.

Para ulama berpendapat bahwa sekalipun tanah atau lahan yang kosong telah diolah dan dimiliki oleh seseorang, didalamnya terdapat hak-hak social yang tidak dapat dilarang untuk dinikmati masyarakat demi keberlangsungan kehidupannya. Hak-hak tersebut ialah hak terhadap air, rumput, dan api.

Oleh karena itu, menurut para ulama, haram hukumnya melarang orang yang menggunakan benda-benda tersebut. Mengapa? Karena ketiga benda tersebut sangat vatal kegunaannya untuk keberlangsungan kehidupan, terutama terutama pada saat dimana hadis-hadis itu disabdakan. Sebagai contoh air sangat berguna untuk minum bagi manusia dan hewan, juga berguana untuk irigasi. Kemudian rumput, berguna sebagai makanan hewan dan pada akhirnya juga untuk kepentingan manusia. Adapun api, (kayu

bakar atau energi yang sifatnya sama dengan kayu bakar) digunakan untuk memproses dan memproduksi.¹⁰

2. Pembagian tanah¹¹

Membagi-bagikan tanah atau lahan menurut ajaran Islam, asalkan saja tanah itu belum menjadi milik seseorang atau suatu lembaga, misalnya tanah-tanah yang masih dikuasai oleh negara. Pengurusan tanah ini tergantung pada kebijakan pemerintah apakah akan dimanfaatkan untuk keperluan industri melalui perusahaan-perusahaan atau akan dibagikan kepada rakyat, seperti yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Ada sebagian tanah yang diizinkan pengelolannya kepada perusahaan perkebunan dan ada juga lahan / tanah dibagi-bagikan kepada peserta transmigrasi.

Menurut Qhadi'iyad yang dikutip oleh al-Kahlani dalam Subulus salam yang dimaksud dengan al-Iqtha (membagi-bagikan tanah) adalah pemeberian pemerintah dari harta Allah swt, yang digarap layak dan pantas untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Sebagian tanah atau lahan diberikan kepada orang-orang yang mampu dan layak mengolahnya. Maka tanah itu akan akan menjadi

¹⁰Muhammad Ismail Al-Kahlan, h, 84.

¹¹*Ibid.*, h. 84.

hak milik orang tersebut supaya dikelola untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

- b. Sebagian tanah diberikan sebagai hak guna usaha bukan sebagai hak milik. Jenis lahan atau tanah itu diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang tertentu yang layak dan mampu memfungsikannya. Hasilnya tentu saja selain untuk pengelola, yang lebih penting untuk kebutuhan masyarakat.

Apabila seseorang telah mulai bekerja menandai tanah yang dimaksudnya, maka dia lebih berhak pada tanah itu dengan dua syarat:

- a. Tanah yang ditandainya itu hanya sekedar cukup untuk keperluannya. Kalau lebih, orang lain boleh mengambil yang lebih itu.
- b. Sanggup dan cukup memiliki alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata untuk menandai tanah saja.

Kalau masa tanah yang di tandai telah lama, sedangkan dia belum juga meneruskannya, maka yang berkuasa didalam negeri boleh memberinya peringatan, dan kepadanya diberi pula kesempatan dalam sedikit waktu agar dia dapat meneruskannya. Apabila tidak diteruskan dalam waktu yang dijanjikan, batallah haknya, dan orang lain berhak mengerjakannya.¹²

¹².Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013). h. 335-336.

Berdasarkan uraian di atas mendorong peneliti mengangkat judul ini dengan tema: **“KONSEP MENGHIDUPKAN TANAH MATI MENURUT IMAM ABU HANIFAH BESERTA RELEVANSINYA DENGAN UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA (UU NO.5 TAHUN 1960)**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah di paparkan dalam latar belakang masalah, maka dapat disusun perumusan masalah guna memudahkan penulis peneliti ini. Dalam penulisan penelitian ini, penulis ingin menjelaskan “Bagaimanakah konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah dan relevansinya dalam Undang-Undang Pokok agraria”?

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan dijadikan bahan pembahasan oleh penulis :

1. Bagaimanakah konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah?
2. Bagaimanakah *Ihyaul mawat* dalam Undang-Undang Pokok agraria?
3. Bagaimana analisa peneliti terhadap *Ihyaul mawat* berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka pembahasan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah.
2. Mengetahui relevansi *Ihya'ul mawat* dengan Undang-Undang Pokok Agraria.
3. Menganalisa pemikiran Imam Abu Hanifah tentang *Ihya'ul mawat* beserta relevansinya dengan Undang-Undang Pokok agraria.

Berawal dari tujuan peneliti tersebut, maka peneliti ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Secara teoritis membuka wacana bagaimana mendeskripsikan dan menganalisa pandangan Imam Abu Hanifah dalam menjelaskan konsep menghidupkan tanah mati beserta relevansinya dengan Undang-Undang Pokok Agraria.
2. Secara akademis untuk memperkaya khazanah intelektual Muslim dalam perdebatan *Ihya'ul mawat*.
3. Secara praktis memberikan masukan kepada civitas akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara tentang gambaran bagaimana konsep menghidupkan tanah mati menurut

Imam Abu Hanifah beserta relevansinya dalam Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang No.5 tahun 1960.

C. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah. Dari hasil pengetahuan penulis ada tulisan terkait dengan Imam Abu Hanifah dengan judul *Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Buku Dalam Kitab Badai' Al-Shanai'* (skripsi), Jurusan Al-Ahwalal Syahsiyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2014.

Dalam tulisan ini di bahas mengenai: Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Wakaf buku dalam kitab *Badai' Al-shanai'*. Imam Abu Hanifah adalah seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Abu Hanifah disebut juga sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh

berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*ṭaharah*), shalat dan seterusnya.¹³

Sementara itu, tulisan yang membahas mengenai pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai *Ihya'ul mawat* beserta relevansinya dengan Pasal Pokok Agraria Undang-Undang No.5 tahun 1960 belum ada. Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan dalam penelitian ini mengenai konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah beserta relevansinya dengan Pasal Pokok Agraria Undang-Undang No.5 tahun 1960 yang dikaji dan dianalisa dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, jurnal, artikel, ataupun data-data kepustakaan lainnya.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah penelitian terhadap konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah beserta relevansinya dengan undang-undang pokok agraria. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan lihat dari bidang keilmuan penelitian ini dapat dikembangkan dalam kajian bidang ilmu fiqh dan hukum agraria.

Dan jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan memanfaatkan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan informasi yang tersedia, baik yang terdokumentasikan

¹³ <http://www.lib.ui.edu>, diunduh tanggal 10 April 2017

dalam bentuk buku, majalah, jurnanal, artikel, ataupun data-data kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

Sumber data dalam teknik penulisan ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah obyek kajian utama yang berupa dari karangan Imam Al-Mawardi al-Ahkam Sulthaniyah, Fiqh Islam, Fiqh Muamalat, Fiqh ekonomi Syariah, Hukum Agraria, Al-Quran dan Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq dan lain sebagainya yang sekaligus sebagai data primer. Sedangkan data sekunder, penulis memperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penulis maupun sumber dari buku penulis lain yang membahas mengenai tokoh yang saya teliti guna sebagai penunjang dan juga sebagai bahan tambahan dari skripsi ini penulis melengkapi penelitian dengan melakukan penelitian melalui media elektronik yaitu internet.

Pengumpulan data yaitu dilakukan dengan pendekatan falsafi dan rasional didasarkan hasil pemikiran cendikiawan muslim, sarjana dan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian didalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis isi (content analysis) yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis isi teks dengan cara merekonstruksi kerangka pemikiran karya yang sedang diteliti secara sistematis, logis, dan universal dari segi sosiologis. Dan setelah itu, dipaparkan secara deskriptif.

Teknik penulisan penelitian ini berpedoman pada Buku Panduan Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SU.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis penelitian ini, pembahasan akan disusun secara sistematis menjadi lima bab, dan tiap bab menjadi sub-sub yang secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan, berisikan dasar pemikiran yang mencerminkan isi seluruh penelitian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas *Ihya'ul mawat* dalam fiqh Mazhab Hanafi yang meliputi sejarah singkat Mazhab Hanafi, pengertian *Ihya'ul mawat*, syarat-syarat *Ihya'ul mawat*, serta pandangan Mazhab Hanafi tentang *Ihya'ul mawat*.

Bab Ketiga membahas *Ihya'ul mawat* dalam Undang Undang Pokok Agraria meliputi pengertian agraria dan kaitanya dengan *Ihya'ul mawat*, serta hak penguasa atas tanah.

Bab Keempat membahas analisis penuli *Ihya'ul mawat* dalam fiqh Hanafi dan analisis penulis tentang Undang Undang Pokok Agraria dalam *Ihya'ul mawat*.

Bab kelima merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

IHYAUL MAWAT DALAM MAZHAB HANAFI

A. Sejarah Singkat Mazhab Hanafi

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalnya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.¹⁴

Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau

¹⁴ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet. ke-9, h. 19

bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.¹⁵

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Neneknya Zauta adalah suku (bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya.

Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.¹⁶

Mazhab Hanafi merupakan salah satu dari 4 (empat) Mazhab fiqih di golongan Ahlussunnah wal jama'ah; yaitu Mazhab Al-Maliki, Mazhab Al-Hanafi Mazhab Asy-Syafi'i dan Mazhab Al-Hambali. Sedangkan yang dimaksud dengan Mazhab adalah: kumpulan pendapat, pandangan ilmiah

¹⁵ *Ibid*, h.20

¹⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *al-Aimatul Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet. ke-3, h. 15.

dan pandangan filsafat yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, yang menjadi satu kesatuan yang terorganisir.¹⁷

Mazhab Hanafi mengemukakan ijihad untuk mengistinbatkan hukum adalah dengan berpedoman pada:

1. Al-Quran

Al-Quran al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimula dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa al-Quran merupakan sendi al-Syariah dan tali Allah yang kokoh, ia adalah yang umum yang kembali kepadanya seluruh hukum-hukumnya, al-Kitab sumbernya, dan tidak ada satu sumber hukum melainkan harus tunduk padanya.

2. Al-Sunnah

Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam

¹⁷ Ahmad Mukhtar 'Umar, Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'ashirah, (Cairo, Alam Al-Kutub, 2008), h.825

bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.

Menurut Imam Abu Hanifah al-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan perinci kandungan al-Kitab yang mujmal sebagaimana fungsi Nabi SAW menyampaikan wahyu yang diturunkan padanya, menjelaskan dan mengajarkan.

3. Fatwa-fatwa (Aqwal) Sahabat

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat para sahabat diperoleh dari *talqiy* dengan Rasulullah SAW, bukan hanya dengan berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas Nabi. Perlu ditambahkan bahwa dalam kitab-kitab Mazhab Imam Hanafi terdapat beberapa perkataan (*aqwal*), yakni qaul Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Zafar bun Hudzail. Karena Imam Abu Hanifah melarang para muridnya untuk taqlid meskipun bertentangan dengan pendapatnya.

4. Qiyas

Qiyas adalah dasar yang paling utama dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang ahli *qiyas* (ahli banding membanding) dan dapat melihat persamaan dan perbedaan antara dua perkara atau beberapa perkara. Ia menempuh metode *qiyas* dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang terdapat dalam *nash* atau berpedoman pada fatwa-fatwa maupun ucapan-ucapan yang dinyatakan oleh para sahabat Nabi Saw, seperti Abu Bakar ash- Shiddiq, Umar Bin Khattab, Ali Bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud.

Abu Hanifah menggunakan *istihsan* ketika '*illat* tidak memenuhi seluruh persyaratan *al-maqis 'alaih* (suatu kasus yang kasus lain diqiyaskan kepadanya), *qiyas* menyalahi *nash* karena *qiyas* digunakan ketika *nash* tidak ada. *Istihsan* Abu Hanifah bukan merupakan tantangan terhadap *nash* atau *qiyas* bahkan merupakan sebagian dari *qiyas*. Karena *istihsan* yang dipakai Abu Hanifah hanyalah tidak mengemukakan *illat qiyas* lantaran berlawanan dengan suatu kemaslahatan masyarakat yang dihargai *syara'* atau berlawanan dengan *nash* atau berlawanan dengan *ijma'* atau diwaktu berlawanan *illat* satu sama lainnya, lalu menguatkan salah satunya.

5. Urf

Urf berarti amalan yang telah diketahui, sedangkan adat adalah kebiasaan yang umum dilakukan. *Urf* dibagi menjadi dua, pertama *urf sahih* yaitu kebiasaan (adat) yang tidak bertentangan dengan *nash*, kedua adalah *urf fasid* yaitu kebiasaan (adat) yang bertentangan dengan *nash*.¹⁸ Abu Hanifah terkenal mahir dalam menggunakan *qiyas* dan *istihsan* dan memperdalam dua hal ini, demikian pula para sahabatnya, sehingga bertambah luaslah persoalan-persoalan fiqh dan bertambah banyak orang yang mendalaminya. Masing-masing mereka mengadakan gambaran bermacam-macam persoalan, dan mencari jawaban bagi setiap persoalan, yang membedakan mereka dengan cara orang-orang sebelumnya.

Para ahli fiqh sebelumnya hanya memikirkan hukum-hukum kejadian yang sudah terjadi secara positif. Mereka tidak membayangkan kejadian-kejadian yang belum terjadi, tidak membuat risalah jawabannya, serta tidak membuat cabang-cabang hukum yang tidak terjadi secara nyata. Bahkan, sebagian dari mereka menolak untuk menjawab masalah yang tidak ada nashnya.¹⁹

¹⁸ Abdur Rahman, *Syar'ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 129.

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Khulasah Taarikh Tasyri' al-Islami*, terj. Ahyar Aminudiin, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), 2000, h. 92.

Dengan demikian, kegiatan fiqh *ra'yu* ini berada di tangan Imam Abu Hanifah dan rekan-rekannya beserta ahli fiqh di Irak. Hal ini menyebabkan terjadinya kemajuan baru dalam ilmu fiqh. Dan segi pendapat dan mencari *illat* serta sifat-sifat yang sesuai dengan hukum memungkinkan diletakkannya hubungan jalan-jalan hukum antara sebagian dengan sebagian lainnya yang sebelumnya masih terpecah belah, dan memungkinkan dikembalikannya setiap kelompok persoalan kepada dasar landasan terbinanya jalan-jalan hukum, serta mengembalikan kepada kaidah yang mengaturnya sehingga menjadi suatu ilmu yang mempunyai banyak kaidah dan usul. Selanjutnya, orang-orang yang asalnya berdiri di atas periwayatan as-Sunnah dan takut membicarakan *ar-ra'yu*, kemudian mengambil *ar-ra'yu* atas nama *al-qiyas* dan *al-masalih al-mursalah*.²⁰

B. Pengertian *Ihya'ul Mawat*

Tanah mati artinya tanah yang gersang, yang sudah tidak digarap lagi, dinamakan yang mati dan *mawatan* adapun arti mutan dengan *Mim* berbaris depan dan Waw berbaris mati akhirnya kematian yang mendadak, dan dikaitkan lelaki *mautan* hati dengan *Fa'* baris atas dan Waw berbaris mati artinya yang tidak bias melihat dan tidak bias memahami, dan menurut makna istilah kalangan ahli fiqh: "Tanah yang

²⁰ *Ibid*, h.93.

tidak ada tuannya dan tidak dimanfaatkan oleh siapa pun sebagaimana dikatakan oleh Ar-Rafi'i.²¹

Secara etimologi, kata *Ihya* berarti menjadikan sesuatu menjadi hidup dan *al-mawat* berarti sesuatu yang tidak bernyawa atau tanah yang tidak dimiliki seseorang dan belum digarap. Pembahasan tentang *Ihya'ul mawat* berkaitan dengan persoalan tanah kosong yang belum digarap dan belum dimiliki seseorang.

Ihya'ul mawat adalah mengelola tanah yang belum pernah di garap sebelumnya dan membuatnya layak untuk dimanfaatkan, seperti dibuat lahan rumah, ditanami dan semisalnya.²²

Hanafiah berpendapat bahwa bagi seorang yang akan membuka atau menghidupkan lahan yang kurang berfungsi, diwajibkan meminta izin kepada penguasa atau pemerintah. Berbeda pula dengan ulama Malikiyah jika lahan itu dekat dengan pemukiman, untuk menggarapnya harus harus mendapat izin dari penguasa atau pemerintah, dan jika lahan itu berada jauh dari pemukiman atau berada di pedalaman, tidak diperlukan izin dari penguasa atau pemerintah. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi objek *Ihya'ul mawat* jika ingin diolah oleh

²¹ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 347.

²² Ahmad Tirdmizi dkk, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet I, 2013, h. 799.

seseorang, tidak perlu mendapat izin dari penguasa/pemerintah, karena lahan seperti itu adalah harta yang dimiliki oleh setiap orang, dan tidak ada petunjuk dari satupun hadis memerintahkannya. Akan tetapi, mereka tetap menyatakan sangat dianjurkan mendapat izin dari penguasa atau pemerintah untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Selain itu menurut ulama Hanafiyah, lahan tersebut harus sudah diolah dalam waktu tiga tahun. Jika tidak sanggup mengolahnya, penguasa atau pemerintah berhak mengambil lahan itu serta memberikannya kepada orang lain.

Pembatasan waktu tiga tahun ini berdasarkan pendapat Umar bin Khatab yang menyatakan “orang yang hanya sekedar memagar lahan sampai dengan tiga tahun dan tidak mengolahnya, maka dia tidak berhak lagi atas tanah itu”. Sementara Syafi’iyah dan Hambaliyah tidak menggunakan pendapat Umar tersebut.²³

Menurut Ulama’ Hanafiyah adalah

اصلاح الارض لايملكها ولاينفع بها احد وتعذر زرعها لانقطاع الماء عنها من العامر

²³ Imam al-Kasani. hlm. 194 bandingkan dengan Sulaiman Rasyid *Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Baru Algen Sindo 2007) hlm 336, bandingkan juga dengan Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedia Umar bin Khattab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999) hlm. 172-176.

Artinya: Penggarapan lahan yang belum dimiliki dan digarap orang lain karena ketiadaan irigasi serta jauh dari pemukiman²⁴

Imam Rafi'i mendefinisikan *Ihya'ul mawat* sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Fathu Qarib: dalam pasal *Ihya'ul mawat* yaitu:

فصل في احكام احياء الموات²⁵

Artinya: Pasal menerangkan tentang hukum-hukum *Ihya'ul mawat* (menghidupkan bumi mati)

و هو كما قال الرافعي في اشرح اصغير ارض لملك لها ولا ينتفع بها احد²⁶

Artinya: Dan dianya "tanah mati" sebagaimana pendapat Imam Rafi'i tersebut di dalam *Syarakhush-Shagir*, yaitu bumi yang tidak ada pemiliknya dan belum ada seorangpun yang mengambil manfaat bumi tersebut.

C. Syarat-syarat *Ihya'ul Mawat*

²⁴ Asy-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1976) Jilid II, hlm. 361

²⁵ Sekh Muhammad bin Qhasim al-Ghaji, *Fathul Qarib al-Mujib*, (Mesir, Mustafa bani al-Hallabi, 1924), h.38

²⁶ *Ibid*, h. 38

1. Tanah yang dibuka masih terlantar dan belum dimiliki oleh seorang pun. Jika tidak, dialokasikan untuk kepentingan kaum muslimin, seperti untuk jalan, lapangan, taman, kuburan, saluran, air, dan lain sebagainya.
2. Cara pembukaan tanah baru sesuai dengan tradisi yang berlaku karena hadis menjelaskan *Ihya'ul mawat* bersifat umum.
3. Sayyid Sabiq menambah persyaratan lainnya, yaitu harus seizin hakim (pemerintah).

Syarat-syarat pengelolaan *Ihya'ul mawat* terkait dengan orang yang mengolah, lahan yang akan diolah, dan proses pengolahan.

أحدهما (ان يكون المحي مسلمان) فيسن له احياء الارض الميتة سواء اذن له الامام لا²⁷

Artinya: Salah satunya, bahwa orang yang menghidupkan itu adalah orang Islam, maka disunahkan baginya menghidupkan bumi mati, sama ada Imam (pemuka) mengijinkan atau tidak.

اللهم الا ان يتعلق بالموات حق كأن حمى الاما قطعة منه واحياها شخص فلا يملكها الا
 باذن الامام فى الآصح²⁸

²⁷ *Ibid*, h. 38

²⁸ *Ibid*, h. 38

Artinya: Ya allah minta perlindungan dari larangannya Imam, kecuali bila ada hak (milik) yang bergandengan dengan bumi mati itu, seperti larangan Imam mengambil sebagian tanah yang mati tersebut dan ada seseorang yang menghidupkannya, maka orang tersebut tidak dapat memilikinya kecuali atas ijin si Imam. Demikian menurut pendapat yang lebih sah.

اما الذمی والمعا هد والمستأ من فليس لهم الاحياء ولو اذن لهم الامام²⁹

Artinya: adapun kafir dzimmi, kafir muahad dan kafir mustakman, mereka semua tidak boleh menghidupkan bumi mati, meskipun Imam mengijinkan mereka.

(و) الثانی (ان يكون الارض حرة لم يجز عليها ملك لمسلم) وفي بعض النسخ ان تكون الارض حرة³⁰

Artinya: Kedua. Bumi yang ada (mati) itu jelas (bebas) belum ada seorang Islampun yang memilikinya dan pada sebagian matan yang lain di jelaskan bahwa tanah tersebut statusnya merdeka.

والمراد من كلام المصنف ان ماكان معمورا وهو الان خراب فهوما لکه ان عرف مسلما كان اودميا ولايملك هذا الخراب بالاحياء³¹

Artinya: Adapun yang dikehendaki dari perkataan Mushannif, yaitu bumi yang sudah pernah digarap, dan pada saat ini dalam keadaan rusak,

²⁹ Ibid, h.38

³⁰ Ibid, h.38

³¹ Ibid, h.38

maka status bumi tersebut menjadi hak orang yang tadinya memiliki, baik dia itu orang Islam atau orang kafir. Dan tidak boleh dimiliki bumi yang rusak ini dengan dihidupkan lagi.

فان لم يعرف مالكه والعمارة اسلامية فهذا المعمور مال ضائع امره لرأى الامام فى حفظه
اوبيعه وحفظ ثمن³²

Artinya: apabila tidak diketahui pemiliknya dan penggarapannya menurut Islam, maka status bumi yang digarap itu menjadi harta yang tersia-sia sedangkan perkaranya (urusannya) tergantung kepada pendapatnya Imam dalam kaitannya dengan menjaga bumi itu atau menjualnya atau memelihara harganya.

وان كان المعمور جا هليا ملك بالا حيا³³

Artinya: jika tanda-tanda penggarapannya tidak ada (tidak diketahui), maka bumi itu biasa dimiliki dengan dihidupkan kembali.

Apabila tanah mati itu tidak ada keterangan siapa pemiliknya, maka tanah tersebut dilihat tanda-tandanya. Jika memang terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya penggarapan (pengolahan) sesudah zaman Islam, maka tanah itu namanya atau statusnya harta Islam yang tidak terpelihara. Dalam hal ini maka hukumannya diserahkan saja kepada putusan Imam. Baik yang menyangkut soal pemeliharanya, penjualannya dan tentang

³² Ibid, h.39

³³ Ibid, h.39

harganya. Sedangkan bila mati itu terdapat tanda-tanda penggarapan menurut agama Jahiliyah sebelum datang agama Islam, maka tanah tersebut dapat dimiliki dengan jalan dihidupkan kembali.

Al-Quran tidak memberikan penjelasan tentang *Ihyaul mawat* secara jelas dan rinci. Al-Quran hanya mengungkapkan secara umum tentang keharusan bertebaran di atas bumi untuk mencari karunia Allah.

Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertaburanlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika tuhan berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbirlah dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? “Allah SWT berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Hadis-hadis yang berkenaan dengan *Ihya'ul Mawat*

عن عائشة رضي الله عنها, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أكرم أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة : قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته (رواه البخاري)

Artinya: Dari Aisyah ra: Nabi Saw pernah bersabda, “orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapapun maka ia berhak memilikinya. “Urwah berkata”, Umar ra member keputusan demikian pada masa kekhalifahannya (H.R Bukhari).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أجلى عمر رضي الله عنه اليهود والنصارى من أرض الحجاج. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خير, أراد إخراج اليهود منها, وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها, فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها ان يكفوا عملها, ولهم نصف الثمر, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : (نقركم بها على ذلك ما شئنا) فقرروا بها حتى أجلى هم عمر ألى تيماء وأريحاء (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra berkata masa Umar ra orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu tinggal di Hijaz dan Rasulullah Saw pada saat

penaklukan atas Khaibar menginginkan supaya orang Yahudi keluar dari Hijaz dan bumi yang disana diperuntukkan kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang Muslim dan menginginkan supaya mereka keluar dari Hijaz, lalu mereka meminta kepada Rasulullah Saw supaya mereka tetap tinggal di Hijaz dan supaya mereka bekerja atau mengelola tanahnya dan memperoleh separo buah-buahan (hasil mengola tanah itu). Rasulullah Saw bersabda kepada mereka, “kami akan membiarkan kalian tinggal disini selama kami mau”, maka mereka (orang-orang yahudi) tinggal disana hingga Umar (pada masa kekhalifahannya) memindahkan mereka ke Tayma dan Ariha. (H.R Bukhari).

وعن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم, فبايعته, فقال من سبق الى ملم يسبق اليه مسلم فهو له قال: فخرج الناس يتعا دون يطخا طون (رواه وابو داود والترمذى³⁴)

Artinya: Dari Asmar bin Mudarris berkata: saya dating menemui Nabi, maka Nabi membait saya, Nabi bersabda: Barang siapa yang lebih dahulu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh seorang muslim yang lain sebelumnya, tanah tersebut menjadi miliknya, Asmar berkata: maka beberapa orang berlomba menuju lahan kosong untuk membuat patok menandai bahwa tanah itu miliknya (H.R Abu Daud)

Dari uraian di atas terlihat bahwa nas hanya menjelaskan sistem menghidupkan lahan tidur secara mutlak. Penjelasan tersebut hanya terkait pada penekanan siapa yang menghidupkan lahan tidur maka ia memilikinya dengan syarat belum dimiliki orang lain dan penjelasan orang yang berhak terhadap sesuatu adalah orang yang lebih dahulu memilikinya. Dalam hadis

³⁴ *Ibid*, h. 228.

tidak dijelaskan ciri-ciri tanah yang sudah dimiliki orang lain, hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa lahan itu lahan tidur yang boleh untuk dihidupkan, dan lain sebagainya. Hadis-hadis itu juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadikan lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan Allah swt dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.³⁵

Menurut Imam Abu Hanifah, harus mendapat izin dari pemerintah, apabila pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh langsung menggarap lahan itu, menurut ulama Malikiyah, jika lahan itu dekat dengan pemukiman, maka menggarapnya harus mendapat izin dari pemerintah, dan jika lahan itu jauh dari pemukiman tidak perlu izin dari pemerintah, menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani keduanya pakar fiqh Hanafi, menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi objek *Ihya'ul mawat* jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapat izin dari pemerintah, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimiliki setiap orang, dan hadis-hadis Rasulullah Saw, tidak ada yang mengatakan perlu izin dari pihak pemerintah, akan tetapi, mereka sangat tetap menganjurkan mendapatkan izin dari pemerintah, untuk menghindari sengketa dikemudian hari.

³⁵ Nasrun Haroen, h. 47.

Menurut ulama Hanafiyah, lahan itu harus sudah digarap dalam waktu tiga tahun, jika selama tiga tahun itu, tidak digarap secara intensif maka pihak pemerintah berhak mengambil lahan itu serta memberikannya kepada orang lain, pembatasan waktu tiga hari ini didasarkan kepada pendapat Umar bin Al-Khattab yang menyatakan “(ucapan Umar ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa’i), pendapat Ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah tidak berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah ini.

D. Pendapat Mazhab Hanafi tentang *Ihya'ul Mawat*

Para ulama berbeda pendapat tentang cara mengolah lahan yang menjadi objek *Ihya'ul mawat*. Abu Hanifah berpendapat: penyuburan tanah tandus memang menjadi sebab pemilikan (tanah), hanya di syaratkan mendapatkan izin dari pemerintah (imam) dari pengakuannya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, cara pengolahannya adalah dengan menggarapnya sebagai lahan pertanian. Untuk itu perlu dibersihkan pepohonan yang ada didalamnya, mencangkul lahannya, membuat saluran irigasinya, baik dengan menggali sumur, maupun dengan mencari sumber air lainnya, menanaminya dengan pepohonan atau tanaman-tanaman produktif

serta memagarinya. Sementara ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa cara untuk mengolah lahan kosong, dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlaku di daerah itu, jika lahan ini dimaksudkan untuk tempat tinggal, maka lahan itu perlu dipagar dan dibangun rumah di atasnya. Jika dimaksudkan untuk pertanian maka lahannya diolah, irigasinya dibuat, dan menanaminya dengan tanaman yang produktif.

Adapun menurut Ulama Hanabilah cara pengolahan *Ihya'ul mawat* adalah cukup dilakukan dengan memagar lahan yang ingin digarap, baik untuk lahan pertanian, tempat gembala hewan, maupun untuk perumahan.³⁶

Sementara itu, Hendi Suhendi dalam buku Fiqh Muamalah menjelaskan cara-cara pengolahan *Ihya'ul mawat* secara perinci sebagai berikut:

1. Menyuburkannya. Cara ini digunakan untuk lahan yang gersang, yakni lahan yang tanamannya sulit tumbuh. Maka pada lahan seperti ini perlu diberi pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk non organik, sehingga lahan itu menjadi subur dan dapat ditanamai dan selanjutnya mendatangkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.
2. Menanam pohon. Cara ini dilakukan untuk lahan-lahan yang relatif subur dan belum terolah. Sebagai tanda-tanda itu telah dikuasai atau

³⁶ Imam al-Kasani *Bada'iul al-Fawa'id* (Bairut: Dar Fikir) Jilid VI, h. 194.

telah ada yang memiliki, perlu diberikan tanda dengan menanam tanaman-tanaman produktif, seperti tanaman untuk makanan pokok, perkebunan atau keras, seperti pohon jati, karet, dan kopi.

3. Membuat pagar. Hal ini dilakukan untuk menandai lahan kosong dan luas, sehingga orang lain mengetahui bahwa tanah itu telah dikuasai oleh seseorang.
4. Menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang lain mengetahui bahwa tanah tersebut telah ada yang menguasai, sehingga menutup jalan bagi orang lain untuk memilikinya.³⁷

Jika bertujuan hendak dibuat perkebunan, maka disyaratkan supaya mengumpulkan tanah dan memberi pagar disekeliling bumi perkebunan itu bila memang berlaku kebiasaan seperti itu. Dan menurut pendapat yang berlaku, disyaratkan supaya tanah tersebut ditanami terus menerus. Demikian menurut madzhab Syafi'i. Ketahuilah, bahwa air yang ditentukan seseorang saja, wajib menyerahkannya karena binatang piaraan orang lain.

Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu:

1. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat.

³⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h. 268-269.

Hak milik atas tanah yang terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah (Aanslibbing). Yang dimaksud dengan pembukaan tanah adalah pembukaan tanah (pembukaan hutan) yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat Hukum Adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui tiga system penggarapan, yaitu matok sirah matok galeng, matok sirah giling galeng, dan system bluburan. Yang dimaksud dengan lidah tanah (Aan slibbing) adalah pertumbuhan tanah yang ditepi sungai, danau atau laut, tanah yang tumbuh demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang bias memiliki tanah yang berbatasan, karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya. Dengan sendirinya terjadinya Hak Milik secara demikian itu juga melalui suatu proses pertumbuhan yang memakan waktu.

Lidah tanah (Aan slibbing) adalah tanah yang timbul atau muncul karena berbeloknya arus sungai atau tanah yang timbul dipinggir pantai, dan terjadi dari lumpur, lumpur tersebut makin lama makin tinggi dan mengeras sehingga akhirnya menjadi tanah. Dalam Hukum Adat, lidah tanah yang tidak begitu luas menjadi hak bagi pemilik tanah yang berbatasan.

Hak Milik atas tanah yang terjadi di sini dapat didaftarkan pada Kantor Pertahanan Kabupaten atau Kota setempat untuk mendapatkan sertifikat Hak Milik atas tanah.

Hak Milik atas tanah yang terjadi menurut Hukum Adat akan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang diperintahkan disini sampai sekarang belum terbentuk.

2. Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah.

Hak milik atas Tanah yang terjadi di sini semula berasal dari tanah negara. Hak Milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian Hak Milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pemerintahan Nasional Republik Indosnesia (BPNRI). Apabiala semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi oleh pemohon, maka Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia atau pejabat dari Badan Pertahanan Republik Indonesia yang diberi pelimpahan kewenangan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten atau Kota setempat untuk di catat dalam Buku Tanah dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak. Pendaftaran SKPH menandai lahirnya Hak Milik atas Tanah.

Pejabat Badan Pertahanan Nasional yang berwenang menerbitkan SKPH di atur dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Permen Agraria atau Kepala BPN No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Permen

Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Badan Pertahan Nasional No.1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah tertentu.

Prosedur dan persyaratan terjadinya Hak Milik atas tanah melalui pemberian hak diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Permen Agraria atau Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

3. Hak Milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan undang-undang.

Hak Milik atas tanah ini terjadi karena undang-undanglah yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1, Pasal II, dan Pasal VII ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria.

Terjadinya Hak Milik atas tanah ini atas dasar ketentuan konversi (perubahan) menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, semua hak atas tanah yang ada harus diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yang dimaksud dengan konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria diubah menjadi hak-hak atas

tanah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria).

Konversi adalah perubahan status hak atas tanah dari dari hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria menjadi hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Penegasan konversi yang berasal dari tanah milik adat diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No.2 Tahun 1962 tentang Penegasan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah.

Hak Milik atas tanah juga dapat terjadi melalui dua cara, yaitu:

a. Secara originair.

Terjadinya Hak Milik Atas tanah untuk pertama kalinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan arena undang-undang.

b. Secara derivative

Suatu subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hukum lain yang semula sudah berstatus tanah Hak Milik, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, pewarisan. Dengan terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut, maka Hak Milik atas tanah

yang sudah ada beralih atau berpendah dari subjek hukum yang satu kepada subjek hukum yang lain.³⁸

BAB III

IHYAUL MAWAT DALAM UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA

A. Pengertian Agraria dan Kaitannya Dengan *Ihyaul Mawat*

Istilah agraria berasal dari kata *akker* (bahasa Belanda), *agros* (bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *agger* (bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *agrarius* (bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, *agrarian* (bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa arti agrarian adalah *relating to land, or to a division or distribution of land; as an agrarian laws.*³⁹

³⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria kajian Komprehensif*, (Jakarta:Kencana 2012) h. 95-98.

³⁹ Urip santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Kencana;Jakarta;2014) h. 1

Menurut Andi Hamzah, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya.⁴⁰ Menurut Subekti dan R.Tjitrosoedibio, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada di dalam tanah misalnya batu, kerikil, tambang, sedangkan yang ada di atas tanah bisa berupa tanaman, bangunan.⁴¹

Dalam undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Dasar Pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No.104 – TLNRI No.2043 diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang Undang Pokok Agraria tidak memberikan pengertian tentang Agraria, hanya memberikan ruang lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam konsiderans, pasal-pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup agrarian menurut UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (BARAKA). A.P.Parlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria memiliki ruang lingkup, yaitu dalam arti sempit, bisa berwujud hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja, sedangkan Pasal 1 dan 2 UUPA telah mengambil sikap dalam pengertian yang meluas, yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam.⁴²

⁴⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia; Jakarta; 1989) h. 32

⁴¹ Subekti dan R. Tjidrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Pradnya Paramita; Jakarta; 1983), h. 12

⁴² *Ibid*, h, 2.

Di lain pihak, istilah agraria menunjukkan bukan saja tanah, tapi juga hubungan-hubungan manusia dengan tanah. Istilah agraria hanya dipakai bila ada tanah dan dua orang atau lebih yang berhubungan dengan tanah. Contoh yang tepat dalam hal ini ialah hubungan antara tuan tanah dan penyewa.⁴³

Sedangkan yang dimaksud dengan Tanah adalah hak yang unik dan terbatas, oleh karena ia berharga. Barang siapa menguasai tanah tersebut, juga menguasai potensi modal yang menguntungkan.⁴⁴ Tanah adalah sesuatu yang unik dan bersifat tetap dan hampir tidak dapat dihancurkan serta memiliki nilai pendapat dan penghasilan.

Tanah bukanlah merupakan sekedar tanah belaka atau kebutuhan yang turun temurun tetapi lebih dari sekedar gumpulan tanah, tambang, mineral di bawahnya, dan bangunan-bangunan yang berdiri dipermukaannya. Tanah yang memiliki nilai yang sangat strategis bagi kehidupan manusia. Oleh karena tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai

⁴³ Hustiati, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandinagannya dengan Landreform di Indonesia*, (Bandar Maju;Bandung;1990) h. 16

⁴⁴ Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertahanan*, (Yogyakarta;Graha Ilmu;2013) h. 1

pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah untuk kepentingan kesejahteraan manusia.⁴⁵

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.

1. Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria

Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang amat adil dan makmur sebagaimana yang telah di cita-citakan. Dalam pada itu hubungan Agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat dari pada tercapainya cita-cita di atas. Hal itu di sebabkan terutama:

⁴⁵ *Ibid*, h, 2

- a. Karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagiannya lainnya lagi di pengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi Nasional sekarang ini;
- b. Karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintah jajahan itu hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat di samping dari peraturan-peraturan dari yang di dasarkan atas hukum adat, hal mana selain menimbulkan berbagai masalah antara golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa;
- c. Karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Berhubungan dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru yang nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun tujuan dari pada Undang-Undang Pokok Agraria ialah:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.⁴⁶

Adapun kaitannya *Ihyaul mawat* dengan Undang Undang Pokok Agraria seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria yang No. 5 Tahun 1996 yang berbunyi :

Hak milik hapus bila:

- a. Tanahnya jatuh kepada negara:⁴⁷
 - 1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
 - 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 - 3. Karena diterlantarkan;

⁴⁶ Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dan Pokok-Pokok Dasar Agraria

⁴⁷ Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dan Pokok-Pokok Dasar Agraria

4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.

b. Tanahnya musnah.

Bunyi Pasal 27 di atas jika dihubungkan dengan pandangan madzhab Hanafi ada perberbedaan, dalam hal antara lain mengenai status tanah yang diterlantarkan dapat menghapuskan hak milik seseorang atas sebidang tanah. Sedangkan perbedaannya antara lain mengenai caranya memperoleh hak milik dan memindahkan hak milik atas sebidang tanah. Menurut madzhab Hanafi, tanah dapat menjadi objek kajian *ihyaul mawat* apabila lahannya itu kosong dan tidak ada pemiliknya, belum digarap dan belum dimiliki seseorang.

Sedangkan didalam Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tanah yang demikian tidak dengan serta merta dapat dimiliki dan digarap seseorang, melainkan harus ada izin lebih dahulu dari instansi yang berwenang. Madzhab Hanafi pun mengatakan harus ada izin dari pemerintah.

Untuk lebih jelasnya mengenai cara-cara untuk memperoleh hak milik disebutkan oleh Pasal 22 Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sebagai berikut:

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah

(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena;

- a. Penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- b. Ketentuan undang-undang

Sedangkan tentang berpindahnya hak milik atas sebidang tanah dalam pasal 26 ditentukan sebagai berikut:

- (1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaran Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap

berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

B. Hak Penguasa atas Tanah

Hak atas tanah adalah suatu hak yang member kewenangan kepada pemiliknya untuk mempergunakan tanah yang dimilikinya. Namun, dalam menggunakan tanah tersebut kita tidak boleh mengabaikan fungsi sosialnyanya. Yang dimaksud dengan tanah berfungsi sosial adalah bahwa hak atas tanah apapun yang dimiliki seseorang tidaklah dapat dibenarkan kalau dipergunakan (atau tidak dapat dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apabila kalau hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau negara.

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara atas sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Hak atas tanah bersumber dari hak

menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik negara warga Indonesia maupun negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.⁴⁸

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, disebutkan macam-macam hak atas tanah, yaitu

1. Hak milik,
2. Hak guna usaha,
3. Hak guna bangunan,
4. Hak guna pakai,
5. Hak sewa untuk bangunan,
6. Hak atas tanah yang bersifat sementara

1. Hak milik

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah. Turun temurun dalam hal ini, mempunyai arti bahwa hak milik tidak hanya berlangsung selama hidupnya orang yang mempunyai untuk pertama kali atas tanah tersebut, tetapi dapat

⁴⁸ *Ibid*, h. 89

dilanjutkan atau diwariskan kepada ahli waris apabila pemilik yang sebelumnya meninggal dunia.⁴⁹

Ketentuan mengenai Hak Milik disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 27 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (1) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak milik diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang diperintahkan disini sampai sekarang belum terbentuk. Untuk itu diberlakukanlah Pasal 56 UUPA, yaitu selama undang-undang tentang Hak milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA.⁵⁰

2. Hak guna usaha

Menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau perternakan. Pengaturan pemerintah No. 40 tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan.

Ketentuan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (2) UUPA, ketentuan lebih

⁴⁹ Nurwidinatno, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Balai Pustaka; cet pertama 1996) h. 4

⁵⁰ *Ibid*, h. 92

lanjut mengenai Hak Guna Usaha diatur dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan. Peraturan yang dimaksudkan disini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, secara khusus diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18.

3. Hak guna bangunan

Pasal 35 UUPA memeberikan pengertian Hak Guna Bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.

Ketentuan mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUPA. Secara khusus di atur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (2) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai HGB diatur dengan peraturan perundang-undangan. Perturan perundang-undangan yang dimaksudkan disini adalah Peraturan Pemerintahan No. 40 Tahun 1996, secara khusus diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 38.

4. Hak pakai

Menurut Pasal 41 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang

dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang member wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelola tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA. Perkataan “menggunakan” dalam hak pakai menunjuk pada pengertian bahwa hak pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “memungut hasil” dalam hak pakai menunjuk pada pengertian bahwa hak pakai digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, perternakan dan perkebunan.

Ketentuan mengenai hak pakai disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 41 sampai sampai dengan Pasal 43 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (2) UUPA, ketentuan lebih lanjut hak pakai diatur dengan peraturan perundang undangan. Peraturan perundang undangan yang dimaksudkan disini adalah Peraturan Pemerintahan No. 40 Tahun 1996, secara khusus diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 58.

5. Hak Sewa Untuk Bangunan

Menurut Pasal 44 ayat (1) UUPA, seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Hak sewa untuk bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah hak milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang hak sewa untuk bangunan.

Dalam penjelasan Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA dinyatakan bahwa “Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat yang khusus, maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan behubung dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUPA. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (Pasal 16 jo. Pasal 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena negara bukan pemilik tanah”.

Ketentuan mengenai Hak Sewa Untuk Bangunan (HSUB) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (2) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan.

Peraturan perundangan yang diperintahkan disini sampai sekarang belum terbentuk.

6. Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara

Hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA. Macam-macam haknya disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, yang meliputi Hak Gadai (Gadai Tanah), hak usaha bagi hasil (Perjanjian Bagi Hasil) , menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Hak-hak atas tanah ini diatur dalam UUPA, dan diberi sifat sementara, dalam waktu yang singkat diusahakan akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Kenyataannya sampai saat ini tidak dapat dihapuskan dan yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat-sifat pemerasan.⁵¹

⁵¹ Urip santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Kencana;Jakarta;2014), h. 101-103

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Penulis Tentang *Ihya'ul Mawat* dalam Fiqh Hanafi

Menghidupkan tanah yang mati atau membuka lahan adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Membuka lahan atau baru berarti membuka kesempatan untuk memperbaiki perekonomian keluarga atau masyarakat. Hal ini merupakan salah satu perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 10 bahwa “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertaubatlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Ihya'ul mawat adalah menghidupkan tanah mati atau membuka lahan baru merupakan suatu yang sudah lama dikenal oleh manusia. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah telah menjelaskan “bagi seorang yang akan membuka atau menghidupkan lahan yang kurang berfungsi, diwajibkan meminta izin kepada penguasa atau pemerintah”.

Adapun status lahan mati yang telah di hidupkan, maka ia menjadi tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) dan tidak boleh dikenakan *kharaj* terhadapnya, baik lahan tersebut diairi dengan menggunakan air dari tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat seper sepuluh) maupun dari tanah *kharaj*. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, “jika lahan mati itu dihidupkan dengan menggunakan air dari tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh). Lahan tersebut berstatus sebagai tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh). Akan tetapi, jika ia diairi dengan menggunakan air dari tanah *kharaj*, lahan tersebut berstatus sebagai tanah *kharaj*.” Muhammad ibn Hasan berkata, “jika lahan tersebut diairi dengan menggunakan air dari sungai yang biasa dibuat oleh orang-orang non Arab, lahan tersebut berstatus sebagai tanah *kharaj*. Akan tetapi, jika ia diairi dengan menggunakan air dari sungai-sungai yang dibuat oleh Allah, seperti Sungai Tigris atau Sungai Efrat, lahan tersebut berstatus sebagai tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh).” Para ulama Irak dan sekitarnya

bersepakat bahwa semua lahan mati dan tanah gersang yang dihidupkan di daerah Basrah maka ia berstatus sebagai tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepesepuluh). Menurut pendapat Muhammad ibn Hasan, karena Sungai Trigis di Basrah termasuk sungai-sungai baru disekitarnya adalah sungai yang dihidupkan oleh kaum Muslimin di atas lahan mati.

Pendapat Ulama Hanafiyah terbagi menjadi dua dalam memberikan alasan untuk menguatkan pendapat Abu Hanifah tersebut. Sebagian dari mereka beralasan bahwa air tanah *kharaj* meresap ke Sungai Trigis di Basrah. Ketika sungai tersebut pasang, airnya tersebut di serap oleh tanah Basrah. Padahal, pasangunya air laut mengembalikan air tawar dari laut yang tidak bercampur dengannya dan tidak diserap olehnya. Jika air laut itu pasang, diserap oleh tanah Basrah dan bukan dari air Sungai Tigris atau Efrat.⁵²

Dalam penelitian skripsi ini yaitu mengambil tanah yang telah tinggal pemiliknya jika di lihat dari yang di jelaskan oleh Imam Abu Hanifah bahwasanya jikalau ada tanah yang sudah ditinggal pemiliknya , tidak terurus dan rusak maka kepemilikan atas tanah tersebut tidak hilang dari orang yang pertama membuka atau mengolahnya haruslah ada izin dari pihak pemerintah.

⁵² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath & Fathurhman, *Sistem pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2014. h. 316

Namun pemahaman penulis jika ada salah seorang dari masyarakat yang apabila mengambail alih tanah yang ditinggal karena alasan tanah tersebut sudah ditinggalkan atau dibiarkan tanpa dimanfaatkan, penulis menilai hal tersebut tidak bisa menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengambil tanah tersebut.

Penulis memandang bahwa pengambilan tanah yang ditinggalkan seseorang itu tidak sah dan tanah tersebut tetap menjadi hak milik orang pertama yang membuka tanah tersebut. Bentuk peralihan tanah dengan cara menghidupkan tanah yang ditinggalkan pemiliknya karena alasan tanah tersebut tidak ada yg mempunyai atau tidak terurus tidaklah menghilangkan hak pemilik tanah tersebut untuk orang yang pertama membukanya atau mengelola tanah tersebut .

Problematika ditengah masyarakat yang terjadi di masyarakat saat ini tentang mengambil tanah atau menghidupkan lahan yang mati kembali yang sudah ditinggal pemiliknya sampai saat ini belum ada kejelasan hukum yang kuat.

B. Analisis Penulis Tentang Undang Undang Pokok Agraria dalam *Ihyaul mawat*

Hak Menguasai Negara Atas Tanah adalah sebutan yang diberikan oleh Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut (UUPA) kepada lembaga hukum dalam hubungan hukum kongkret antara negara dan tanah Indonesia yang dirinci isi dan tujuannya dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pokok Agraria.

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria). Yang berarti bahwa hak bangsa Indonesia atas tanah meliputi seluruh tanah yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa tanah-tanah yang ada di Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia.

Bersumber pada besarnya kekuasaan negara atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. maka disusun Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan berarti bahwa telah diletakkan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan pertanahan. Yang bertujuan guna mewujudkan tujuan pembinaan hukum pertanahan serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa bumi (tanah), air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang terdapat diwilayah Republik Indonesia, bukan merupakan milik negara akan tetapi pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut untuk :

- a. menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- b. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Didalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita citacitakan. Dalam pada itu hukum Agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur

tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat dari pada tercapainya cita-cita diatas.

Menurut pembahasan mengenai sejarah pengusahaan hak atas tanah di Indonesia akan dimulai dari tonggak sejarah pada tahun 1811 pada waktu Indonesia dipengaruhi oleh pikiran Raffles dengan teori domeinnya.

Dengan demikian, apabila mengacu kepada kedua ketentuan yang telah disebutkan, jelas bahwa secara hukum keputusan Gubernur telah telah melanggar ketentuan dalam hukum agraria tersebut. Sebab kalau dinyatakan dalam surat Gubernur bahwa penyerahan secara hukum mengenai tanah yang belum bersertifikat tidak diperbolehkan mempergunakan formulir Akta “Jual Beli Tanah”, tetapi hanya mempergunakan “Akta Penyerahan”, maka itu tidak benar. Walaupun dalam kenyataan, berdasarkan dictum keempat Undang-Undang Pokok Agraria.⁵³

Oleh sebab itu, suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa hampir seratus persen pemilikan dan penguasaan hak atas tanah yang terdapat di desa-desa diseluruh Indonesia diperoleh karena pembukaan lahan. Inilah logikan hukum yang diakomendasi oleh penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, yang intinya pembukaan lahan merupakan cara masyarakat memperoleh hak atas tanah yang ada didesa.

⁵³ Supriadi, Hukum Agraria, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2012*), h. 51.

Dengan adanya argumnetasi hukum tersebut, keluarnya SK Gubernur yang tidak mengakui hak-hak adat di Sulawesi Tengah sangat keliru.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan judul skripsi penulis yakni konsep menghidupkan tanah mati menurut Mazhab Hanafi beserta relevansinya Pasal Pokok Agraria (Undang-Undang No.5 Tahun 1960), dapatlah disimpulkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa konsep menghidupkan tanah mati harus ada izin dari pemerintah. Apabila pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh langsung menggarap lahan itu. Dan lahan itu harus sudah digarap dalam jangka waktu tiga tahun, jika selama tiga tahun itu tidak digarap secara

intensif maka pihak pemerintah berhak mengambil lahan itu serta memberikannya kepada orang lain.

Begitupun didalam Pasal Pokok Agraria tidak serta merta dapat dimiliki seseorang melainkan harus ada izin dahulu dari instansi yang berwenang. Yang terpenting tujuan dari *Ihyaul mawat* itu untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia dapat sebagai suatu petunjuk agar apabila jika ingin memiliki suatu tanah yang kosong yang tidak ada pemiliknya haruslah ada izin dari pihak instansi yang berwenang.

Maka dari itu, hubungannya dengan *Ihyaul mawat* dengan Pasal Pokok Agraria adalah saling terkait satu sama lain.

B. SARAN

Setelah meneliti permasalahan ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada seluruh instansi pemerintah masyarakat Indonesia yang terkait agar lebih aktif dalam memperhatikan tentang permasalahan tanah di tengah-tengah masyarakat.
2. Kepada seluruh tokoh Agama untuk lebih aktif dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bagaimana konsep *Ihyaul mawat* atau cara membuka lahan yang baru dalam Islam agar

tidak ada kesan mengambil hak orang lain yang kemudian hari menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat.

3. Kepada seluruh masyarakat agar lebih mendalam hukum Islam serta mengamalkan karena dengan mengkaji hukum Islam serta mengamalkan dengan baik insya Allah hubungan antar masyarakat akan selalu terjaga, aman dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Kasani, Imam. bandingkan dengan Sulaiman Rasyid *Fiqh Islam* Jakarta:

Sinar Baru Algen Sindo 2007.

Al-Mawardi. Imam, *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath &

Fathurrhman, *Sistem pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi

Press, 2014.

Asy-Syurbasi, Ahmad. *al-Aimatul Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda dan

Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Sinar

Grafika, 2001.

Azis Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2014.

- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Cet 5, Jakarta: UI Press.1990.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia; Jakarta; 1989.
- <http://www.lib.ui.edu>, diunduh tanggal 10 April 2017
- Hustiati, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandinagannya dengan Landreform di Indonesia*, Bandar Maju; Bandung; 1990.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayat Al Akhyar Fii Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Ismaya, Samun. *Hukum Administrasi Pertahanan*, Yogyakarta; Graha Ilmu; 2013.
- Mukhtar 'Umar, Ahmad. *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, Cairo, Alam Al-Kutub, 2008.
- Nurwidinatno, *Hak-Hak Atas Tanah*, Balai Pustaka; cet peratama 1996.
- Qal'ahj i *Ensiklopedia Umar bin Khattab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999.
- R. Tjdrosoedibio, Subekti *Kamus Hukum*, Pradnnya Paramita; Jakarta; 1983.
- Rahman, Abdur. *Syar'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Rasjid, Sulaiman , *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Juz 3, Kairo: Makkah Dar al-Turas.
- Suhendi, Hendi , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah, Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta:Sinar Grafika,2012.
- Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia.
- Tirdmizi dkk, Ahmad. Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet I,2013.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dan Pokok-Pokok Dasar Agraria.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Khulasah Taarikh Tasyri' al-Islami*, terj. Ahyar Aminudiin, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ifroh fitria adalah putri ke empat dari lima bersaudara, pasangan dari Ayahanda Hasimuddin dan Ibunda Saumian. Penulis dilahirkan di Patiluban tanggal 02 Februari 1994.

Memiliki latar belakang pendidikan, pada tahun 2006 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri Bonda Kase No. 359, selanjutnya pada tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Swasta Di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru.

Kemudian atas keinginan penulis dan dukungan dari orang tua, pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Syari'ah dan

Hukum Jurusan Siyasah dan selesai pada bulan Agustus 2017. Insya Allah penulis berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

Selama kuliah di UIN-SU, penulis merupakan mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan seperti seminar yang di adakan berbagai elemen intra dan ekstra kampus, disamping itu penulis aktif di keorganisasian intra kampus seperti FORMAPIH 2016 dan PMII tahun 2014-2016. Sepanjang karier penulis dibidang keorganisasian, penulis juga merupakan tenaga pendidik Privat di bidang Agama di Medan.